

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Bastian Indra (2006:274) Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) dalam penelitian Bambang (2013:11) bahwa : istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mahsun (Mahsun, 2016:18) definisi kinerja pemerintah daerah adalah:

"Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari pencapaian program/kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi.

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006).

Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan meliputi perencanaan anggaran yang realistis, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kemampuan manajerial aparat pemerintah, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, kualitas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal juga berperan penting dalam menciptakan laporan keuangan yang andal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kinerja pemerintah perlu dipertimbangkan faktor tingkat korupsi. Penelitian Rajkumar dan Swuroop (2008) menemukan bahwa tingkat korupsi dapat memperlemah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja pemerintah. Tingkat korupsi yang rendah menggambarkan bahwa pemerintah memiliki tata kelola yang baik. Dengan tata kelola yang baik, maka masing-masing bagian dalam pemerintahan berfungsi dengan baik sehingga menjadi lebih efektif yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dua faktor yang memegang peranan penting adalah *good governance* dan disiplin kerja. Tata

pemerintahan yang baik merupakan bentuk penerimaan akan pentingnya suatu seperangkat aturan sehingga itu *good governance* untuk mengatur hubungan antara fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan kinerja dalam pelayanan publik. Untuk itu prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Maka perlu disediakan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik, yang sangat penting untuk akuntabilitas atas semua kegiatan kepada semua pihak yang terlibat. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di Indonesia juga diatur dalam UU no. 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pemerintahan lokal.

Isinya antara lain:

1. Otonomi Terbatas
2. Kepastian Hukum
3. Tertib Penyelenggaraan Negara
4. Kepentingan Umum
5. Keterbukaan
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas

Selain prinsip-prinsip di atas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga mengatur tentang pembentukan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan keuangan daerah.

Menurut Dwiyanto (2008:21), pemerintah yang baik (*Good Governance*) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholder) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah, sedangkan Sedarmayanti (2009:2) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good sandservis.

Penerapan *good governance* yang baik akan tercermin dalam kinerja pegawai pemerintah. Penerapan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini juga menjadi faktor terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja.

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja yang baik pada diri karyawan akan menciptakan siklus kerja yang baik, dan akan menunjang pencapaian tujuan organisasi. Disiplin kerja sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai kantor maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan karyawan yang berkualitas, disiplin yang baik dari pegawai juga akan menunjukkan bahwa organisasi dapat memelihara serta menjaga loyalitas dan kualitas pegawainya, dari disiplin juga dapat diketahui nilai kualitas kerja dari para pegawainya kedisiplinan juga merupakan fungsi operatif yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi

presetasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Disiplin merupakan fungsi yang sangat penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Disiplin adalah merupakan peraturan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai merupakan tanggungjawabnya, seperti tugas-tugas dikantor dan kehadiran karyawan pada jam yang sudah disesuaikan di kantor camat. Disiplin semakin tinggi, maka kinerja pada karyawan juga akan meningkat, sehingga karyawan akan dengan ikhlas bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dari sebuah kantor (Jepry and Mardika 2020).

Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Camat Lubuk Raja masih belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil pra survei, pada indikator akuntabilitas, diketahui bahwa hanya 55% pegawai yang turut bertanggung jawab terhadap kinerja kerja yang dilakukan secara periodik melalui laporan kinerja, sedangkan sisanya tidak melakukan secara periodik. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan pegawai dalam pertanggungjawaban kinerja belum merata. Meskipun secara umum sistem akuntabilitas telah berjalan baik menurut 80% responden, namun pelaksanaannya masih belum menyentuh seluruh lapisan pegawai.

Pada aspek berorientasi pada consensus, 55% responden menyatakan ditempat kerja mereka tidak membuat kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, yang menunjukkan belum semua pegawai mampu bekerja sesuai dengan kebijakan demi kepentingan masyarakat, Sementara itu,

dari segi transparansi, ditemukan bahwa sebagian besar responden merasa belum memiliki peran yang aktif dalam memberikan pendapat dan kritik terhadap proses penyelenggaraan pemerintah daerah, serta belum seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip transparansi, yang seharusnya menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain *good governance*, permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah rendahnya disiplin kerja sebagian pegawai. Berdasarkan data pra survei yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan signifikan terkait dengan kedisiplinan pegawai. Sebanyak 80% pegawai dilaporkan sering datang terlambat ke tempat kerja tanpa alasan yang jelas, sementara 90% pegawai sering meninggalkan tempat kerja lebih awal. Keterangan pegawai yang menyadari akan kondisi ini menyatakan hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam mencapai kinerja optimal di lingkungan pemerintah daerah. Disiplin kerja yang rendah dapat berdampak pada penurunan produktivitas, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas dalam penyelesaian tugas administratif yang krusial. Ketidaksiplinan ini juga dapat merusak citra institusi pemerintah di mata masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, 65% pegawai juga tercatat sering menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya diselesaikan segera. Menunda pekerjaan atau prokrastinasi ini merupakan masalah yang sering kali sulit terdeteksi secara langsung, namun memiliki dampak jangka panjang terhadap kinerja individu dan tim. Penundaan pekerjaan menyebabkan penumpukan tugas yang pada akhirnya berpotensi

memperlambat alur kerja dan mengurangi efektivitas dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya tantangan terkait dengan manajemen waktu dan prioritas pekerjaan, yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak manajemen di Kantor Camat Lubuk Raja. Fenomena tersebut berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya di Kantor Camat Lubuk Raja. Berdasarkan hasil pra survei, ditemukan bahwa tidak semua pegawai mampu melaksanakan tugas tepat waktu dan konsisten terhadap peraturan yang berlaku. Bahkan, masih terdapat pegawai yang merasa tidak mampu memenuhi beban kerja yang ditetapkan, serta belum merasa bahwa perannya memberikan manfaat maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai kinerja pegawai, yakni rendahnya disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil prasuvei, ditemukan bahwa 65% pegawai tidak selalu dapat melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam memenuhi target atau deadline yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan di lingkungan kantor camat. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dapat menghambat pencapaian tujuan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Fenomena ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Kantor Camat Lubuk Raja belum optimal, dan hal ini berakar pada dua hal utama: rendahnya penerapan prinsip good governance dalam aktivitas pemerintahan dan masih lemahnya disiplin kerja pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kantor Camat Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh *Good Governance* dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Raja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Disiplin Kerja terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Kantor Camat Keccamatan Lubuk Raja.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan Pengaruh *Good Governance* yang dapat mempengaruhinya, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data pendukung bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. .

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan kepustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan rujukan dari para pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta memperkaya literatur bahan bacaan bagi mahasiswa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan, kemampuan berpikir, menganalisa dan pengetahuan peneliti dalam bidang akuntansi, khususnya dibidang penelitian tentang pengaruh *good governance* dan disiplin kerja terhadap kinerja pemerintah daerah.